BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyajian neraca daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdaganngan Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan sudah dalam kriteria baik. Bila dilihat dari setiap indikator penyajian laporan neraca tepat waktu, adanya pemeriksaan/respon (audit) pemerintah, berguna untuk pengambilan keputusan, mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan, menggambarkan substansi ekonomi dari sesuatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya, netral, yaitu bebas dari keberpihakan, mencerminkan kehati-hatian, mencakup semua hal yang material berada dalam kategori sangat baik. Sedangkan untuk indicator pertanggungjawaban dana publik, rasio efektifitas, rasio efesiensi, rasio keserasian belanja berada dalam kategori baik. Namun untuk indikator rasio kemandirian menunjukkan kriteria kurang baik karena Disperindag Jabar yang di khususkan pada tiap bidang responden belum mampu membiayai program dan kegiatannya sendiri, hal ini disebabkan adanya pengalokasian dana dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk

membiayai program dan kegiatan yang sudah dicanangkan yang kemudian dana tersebut dialokasikan oleh Disperindag Jabar kepada tiap bidang untuk menjalankan program dan kegiatan.

2. Akuntabilitas publik pada Dinas Perindustrian dan Perdaganngan Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan sudah dalam kriteria baik. Bila dilihat dari setiap indikator pembuatan keputusan memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku dan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar berada pada kategori baik, sedangkan untuk indikator akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program, kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil dan dikomunikasikan, meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintahan, sistem manajemen dan mentoring hasil berada dalam kategori sangat baik.
3. Kinerja pada Dinas Perindustrian dan Perdaganngan Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan sudah dalam kriteria baik. Bila dilihat dari setiap indikator perencanaan jangka menengah, perencanaan jangka tahunan, pencapaian keberhasilan tujuan dan sasaran strategis berada dalam kategori baik. Sedangkan untuk indikator pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan berada dalam kategori sangat baik.
4. Penyajian neraca daerah memberikan pengaruh positif signifikan dengan kriteria cukup terhadap akuntabilitas publik pada Dinas Perindustrian dan

Perdaganngan Provinsi Jawa Barat. Hal ini berarti neraca daerah cukup mendominasi dalam akuntabilitas publik.

5. Akuntabilitas publik memberikan pengaruh positif signifikan dengan kriteria cukup terhadap kinerja pada Dinas Perindustrian dan Perdaganngan Provinsi Jawa Barat. Hal ini berarti akuntabilitas publik cukup di dominasi oleh kinerja.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka penulis memberi beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat memberikan pelatihan bagi para pegawainya dan meningkatkan ketepatan waktu dalam pelaporan laporan keuangan bulanan agar dalam penyajian neraca daerah dapat menjadi lebih baik lagi.
2. Sebaiknya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat meningkatkan akuntabilitas publik dengan lebih meningkatkan publikasi arus informasi kepada publik sebagai bentuk pertanggugjawaban kepada masyarakat.
3. Sebaiknya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja para pegawainya dengan memperketat pemantauan dan pengendalian kinerja pegawai.

4. Sebaiknya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat memperhatikan faktor penyajian neraca daerah sebagai salah satu faktor yang akan menentukan akuntabilitas publik.
5. Sebaiknya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat memperhatikan faktor kinerja sebagai salah satu faktor yang akan menentukan akuntabilitas publik.